

**PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS BLBI KEPADA BANK
DAGANG NASIONAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG -
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh:
Heriyanto
201920251017



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA JAKARTA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : “Penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI Kepada Bank Dagang Nasional Indonesia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Nama Mahasiswa : Heriyanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 2 Juli 2021

Jakarta, Juli 2021
Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. MS. Tumanggor, S.H., M.Si.

NIDN: 0304065402


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN : 0319046403

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : "Penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI Kepada Bank Dagang Nasional Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi"

Nama Mahasiswa : Heriyanto
Nomor Pokok Mahasiswa : 201920251017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 2 Juli 2021

Jakarta, Juli 2021
Mengesahkan

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. MS. Tumanggor, S.H., M.Si.
NIDN: 0304065402

Penguji I : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN : 0319046403

Penguji II : Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D
NIDN : 0307078203

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Lusla Sulastri, S.H., M.H.
NIDN: 0127117401

Dekan Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN: 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis Yang Berjudul

“Penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI Kepada Bank Dagang Nasional Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 1 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan



Heriyanto
201920251017

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara seakan tak pernah surut, meskipun aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tak terkecuali tindak pidana korupsi dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (SKL-BLBI) kepada Sjamjul Nursalim. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Syafrudin Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana? dan bagaimana upaya peneliti terkait kasus Syafrudin Arsyad Temenggung yang telah menerbitkan SKL BLBI kepada Samsul Nursalim tidak terulang lagi?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Syafrudin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana adalah merupakan suatu yang keliru, mengingat perkara penerbitan SKL BLBI kepada sejumlah obligor salah satunya Samsul Nursalim murni berada di ranah pidana. Pada peradilan di tingkat pertama dan banding, majelis hakim sudah menyimpulkan bahwa Syafrudin terbukti melakukan tindak pidana dan para saksi hingga ahli yang dihadirkan di persidangan sudah secara terang benderang menyebutkan keterlibatan atau kekeliruan dari Syafrudin menerbitkan SKL BLBI kepada Samsul Nursalim itu. Padahal diketahui bahwa yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban atau bahwa ada upaya mengelabui negara dengan jaminan aset yang tidak senilai dengan perjanjian awal. Di sisi lain, suatu perbuatan di bidang perbankan yang dalam hal ini dilakukan oleh Syafrudin Arsyad Temenggung melanggar prosedur atau persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi. Upaya peneliti terkait kasus Syafrudin Arsyad Temenggung yang telah menerbitkan SKL BLBI kepada Samsul Nursalim tidak terulang lagi dengan dilakukan urgensi pembentukan lembaga eksaminasi. Eksaminasi sendiri memiliki arti ujian atau pemeriksaan.

Kata Kunci: Penerbitan Surat Keterangan Lunas, BLBI, Korupsi.

**Penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI Kepada Bank Dagang Nasional
Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Heriyanto

Faculty of Law, Bhayangkara Jaya University, Jakarta, Indonesia

heriypmj@gmail.com

Abstract

Corruption crimes involving state officials never seem to have subsided, even though law enforcement officials, in this case the Corruption Eradication Commission, have arrested the perpetrators of corruption, including corruption in the alleged corruption case issuing a Certificate of Settlement for Bank Indonesia Liquidation Assistance (SKL- BLBI) to Sjamjul Nursalim. There are three issues discussed in this research, namely: what is the basis for the judgment of the Supreme Court judge who stated that Syafrudin Temenggung was proven to have committed an act as charged, but that the act was not a criminal act? and how can the researchers' efforts related to the case of Syafrudidin Arsyad Temenggung, who issued the SKL BLBI to Sjamsul Nursalim, not be repeated?

The research method used in this research is normative juridical research method. The materials studied were primary, secondary and tertiary legal materials. The results showed that the basis for the consideration of the Supreme Court judge stating that Syafrudin Arsyad Temenggung was proven to have committed an act as charged, but that the act was not a criminal act was a mistake, considering the case of issuing SKL BLBI to a number of obligors, one of which was pure Sjamsul Nursalim. are in the realm of crime. At the trial at the first level and on appeal, the panel of judges had concluded that Syafruddin was proven to have committed a criminal act and the witnesses so that the experts presented at the trial had clearly stated Syafruddin 's involvement or mistake in issuing the SKL BLBI to Sjamsul Nursalim. Even though it is known that the person concerned has not fulfilled his obligations or that there have been attempts to deceive the state into guaranteeing assets that are not worth the original agreement.

On the other hand, an act in the banking sector which in this case was carried out by Safruddin Arsyad Temenggung violates the procedures or requirements as stipulated in Government Regulation Number 17 of 1999 concerning the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), can qualify as an illegal act, which is one of the elements is not criminal corruption. Researcher's efforts related to the case of Syafrudidin Arsyad Temenggung, who had issued SKL BLBI to Sjamsul Nursalim, were not repeated with the urgency of establishing an examination institute. Eksamination itself means examination or examination.

Keywords: *Issuance of Certificate of Settlement, BLBI, Corruption.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan campur tangannya dengan keajaiban limpahan rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Judul tesis yang penulis ambil adalah **“Penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI Kepada Bank Dagang Nasional Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”**

Penulis menyadari sepenuhnya, tesis ini jauh dari sempurna dan penulisan tesis ini tidak dapat menyelesaikan masalah terkait kasus BLBI. Penyusunan tesis ini tidak dapat berjalan tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Prof. Dr. MS. Tumanggor, S.H., M.Si selaku Pembimbing I materi tesis yang telah banyak memberikan arahan, perhatian serta koreksi yang membangun sehingga penulis bisa lebih memahami untuk menulis sebuah tesis yang baik dan benar.

5. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II materi tesis yang telah banyak memberikan arahan, perhatian serta koreksi yang membangun sehingga penulis bisa lebih memahami untuk menulis sebuah tesis yang baik dan benar.
6. Bapak/Ibu selaku Guru Besar dan seluruh Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu, pemahaman dan perhatiannya.
7. Seluruh karyawan dan staf Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu dalam birokrasi dan informasi sehingga penyusun tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
8. Segenap Civitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Keluarga yang selalu memberikan dukungan, dorongan, semangat dan inspirasi setiap saat sehingga selesainya tesis ini.
10. Teman-teman yang selalu memberikan bantuan, semangat dan inspirasi setiap saat hingga selesainya tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang namanya tidak dapat saya tuliskan satu persatu, dan permohonan maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan selama proses pengerjaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Semoga kita selalu berada dalam suasana hati yang senang tanpa selalu berkeluh putus asa. Sekian dan terima kasih.

Jakarta, Mei 2021



(Heriyanto)

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Perumusan Masalah	11
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan	14
BAB II. LANDASAN TEORI	17
2.1 Teori <i>Restorative Justice</i>	17
2.2 Teori Penegakan Hukum	28
2.3 Teori Tindak Pidana Korupsi	55
BAB III. HASIL PENELITIAN	79
3.1 Kasus Posisi	79
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim	82
3.3 Vonis Hakim	93

BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	96
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang Menyatakan bahwa Syafrudin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana	96
4.2 Upaya Peneliti terkait kasus Syafrudidin Arsyad Temenggung yang telah Menerbitkan SKL BLBI Kepada Sjamsul Nursalim Supaya Tidak Terulang Lagi	119
BAB V. PENUTUP	132
5.1 Simpulan	132
5.2 Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	